BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat DPU Bina Marga Propinsi Jawa Barat

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah sehingga menjadi bahan incaran bangsa Eropa yang ingin berkuasa dan merampas harta kekayaan dengan cara menjajah. Beratus-ratus tahun lamanya bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, setiap penjajah yang berkuasa di Indonesia berpengaruh besar terhadap struktur perekonomian.

Dinas Pekerjaan Umum pun mengalami perubahan karena pengaruh dari penjajah. Pada jaman penjajahan Belanda nama Dinas Pekerjaan Umum terkenal dengan sebutan "BOW" singkatan dari BOUNGELIJ OPEN BARWEKN. Dengan penjajahan ketiga samudera dunia yaitu Eropa Atlantik, India, Pasifik terbukalah bagi Eropa dunia yang lebih luas. Bangsa Belanda mulai di perairan Indonesia kira-kira seratus tahun Vasco Da Gama menemukan jalan laut dari Eropa ke India. Mengenai struktur organisasi yang pertama kali mendirikan Dinas Pekerjaan Umum adalah bangsa Indonesia sendiri.

Pada jaman penjajahan Jepang, sebagai akibat perang dunia kedua Jepang mengalahkan Belanda dan berhasil menguasai Asia Tenggara. Akibatnya Dinas Pekerjaan Umum mengalami perubahan yang waktu itu dikenal dengan sebutan "DOBUKO JIMUSSO". Bentuk dan struktur organisasi sama dengan bentuk dan struktur organisasi pada jaman penjajahan Belanda. Akibat perubahan tersebut karena pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sehingga Indonesia lepas dari penjajahan akan tetapi keserakahan Belanda untuk menjajah Indonesia timbul kembali yaitu dengan membonceng pada sekutu yang menang pada perang dunia kedua. Rakyat Indonesia serentak mengadakan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu itu ada perkumpulan pemuda yang bernama Plut, warga Plut tidak tinggal diam melihat kedatangan Belanda ke Indonesia. Dengan berjuang mempertahankan Gedung Sate dari tangan penjajah karena Gedung Sate kantor pusat Plut.

Sehubungan dengan perlawanan itu telah gugur tujuh warga Plut di Gedung Sate yang berada di jalan Diponegoro No.22 Bandung.

Tujuh pemuda tersebut adalah :

1. Dedi Herdianto Kamarga
2. Muchtarudin
3. Rio Susilo
4. Soehodo
5. Soebengot
6. Ranu
7. Sukardjono

Peristiwa tersebut terjadi tanggal 3 Desember 1945, maka setiap tanggal 3 Desember dijadikan hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum. Untuk mengenang jasa para pemuda yang telah gugur, maka atas perintah menteri Plut dibuat suatu monumen yang dinamakan Monumen Sapta Taruna yang terletak didepan Gedung sate.

Setelah negara kesatuan RI terbentuk kembali serta dibubarkannya negara-negara bagian relasi dengan UU No.22/1945 tentang ekonomi daerah termasuk pembentukan Propinsi Jawa Barat adalah jawatan ekonomi setelah keluarnya UU No.22/1945, maka Dinas Pekerjaan Umum DT I Jawa Barat ketika itu pula dibentuk susunan pemerintahan yang disesuaikan UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila.

2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur Organisasi dan uraian tugas pada sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
   - Menyusun rencana kerja kerja Sub Bagian Keuangan.
   - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas kepada bawahan.
   - Memantau dan mengawasi kegiatan bawahan.
   - Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
   - Menyusun konsep Anggaran Rutin (AR) dan Anggaran Pembangunan (AP) serta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I di lingkungan DPU Bina Marga Propinsi DT I Jabar.

- Memaraf Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rutin Beban Sementara maupun Beban Tetap yang akan ditandatangani oleh atasan langsung bendaharawan.
- Mengoreksi dan meneliti konsep usulan penunjukan Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pembangunan.

2. Bendaharawan Rutin
   - Menerima dan mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
   - Melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan rincian kegiatan yang terdapat dalam Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan anggaran yang tersedia.
   - Melaksanakan pencatatan anggaran sesuai dengan pos anggaran yang tersedia untuk pengendalian anggaran.
   - Melaksanakan pembukuan Keuangan Anggaran Rutin sesuai dengan aturan perundang-undangan.
   - Membuat dan menyusun surat pertanggung jawaban Keuangan Anggaran Rutin setiap akhir bulan.
3. Bendaharawan gaji
   - Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
   - Memeriksa dan mengoreksi Daftar Gaji, tunjangan dan rapel pegawai yang telah mendapatkan persetujuan.
   - Mengoreksi rekapitulasi potongan gaji pegawai berdasarkan persetujuan atasan langsung.

- Mengatur pemasukan uang kedalam amplop pembayaran gaji, tunjangan dan rapel pegawai sesuai dengan Formulir Master Gaji (FMG).
- Membuat FMG ikhtisar daftar gaji dan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti pembayaran gaji, tunjangan dan rapel gaji di lingkungan Dinas Bina Marga Propinsi Jabar.
- Membuat laporan pertanggung jawaban atas uang yang diurusnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Pembuat Daftar Gaji
   - Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
   - Mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan pembuat Daftar Gaji.
   - Membuat dan mempersiapkan kelengkapan persyaratan untuk SPP gaji.
   - Membuat dan menyampaikan Daftar Gaji para pegawai kepada Bendaharawan Gaji.
   - Mengadakan kerjasama dengan Bendaharawan Gaji dalam pelaksanaan tugasnya.
   - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidangnya.
   - Melaporkan atas pelaksanaan tugas kepada atasan.

5. Bendaharawan Penerima

- Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- Melaksanakan penyusunan rencana penerimaan sesuai rincian jenis penerimaan.
- Melaksanakan penerimaan, mencatat dalam buku kas umum uang yang diterima sesuai dengan ketentuan.
- Melaksanakan penyetoran uang penerimaan ke kas Dipenda Tingkat (DT) I.
- Melaksanakan penyetoran uang legas ke DT I.
- Memberi layanan legas.
- Melaporkan atas pelaksanaan tugas pada atasan.

6. Pengadministrasian Keuangan Pembangunan.

- Mencatat dan menginventarisir usulan kebutuhan anggaran dari DPU Bina Marga Kab/Kodya Dati II.
- Menyusun konsep usulan kepangkatan calon Bendaharawan sesuai petunjuk pimpinan.
- Menyusun laporan administrasi laporan pembangunan secara periodik.
- Mengumpulkan dan memelihara arsip data administrasi keuangan pembangunan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengadministrasian keuangan pembangunan.

2.3 Aspek Kegiatan DPU Bina Marga Propinsi Jawa Barat

Rencana kerja Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, Departemen pemukiman dan Prasarana Wilayah maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Untuk menunjang kegiatan pembangunan sosial ekonomi dalam pengembangan prasarana fisik, mengingat sektor perhubungan memegang peranan penting Dinas Bina Marga melakukan kegiatan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, memperlancar hubungan antara daerah produsen dengan daerah konsumen serta hubungan antara desa dan kota. Mengembangkan hubungan dari atau ke daerah produksi yang terpencil yang berpotensi tinggi, memperlancar jalannya roda pemerintahan, memperlancar dan mepertinggi tingkat pertahanan dan keamanan. Untuk realisasinnya dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan maksud mempertahankan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
2. Peningkatan dan perbaikan jalan.
3. Peningkatan serta perbaikan jembatan serta gorong-gorong.
4. Pengadaan peralatan penunjang prasarana jalan seperti jembatan Bailey, peralatan laboratorium serta pemeliharaan peralatan penujang untuk penyelidikan bahan tanah dan jalan.
5. Penganggulangan bencana alam.